

## Focus Group Discussion (FGD)

### Satu Data Kemiskinan: Bagaimana Mencapainya dan untuk Siapa?

Belajar Model Satu Data untuk Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Gunungkidul

Selasa, 24 September 2019 di Ibis Jakarta Tamarin Hotel

---

#### A. Latar Belakang

Tanpa harus repot melacak ke belakang, relatif mudah mengidentifikasi bahwa salah satu persoalan laten dalam pembangunan di negara ini adalah data. Sebut saja masalah yang mungkin muncul soal data, mulai dari akurasi; keterpaduan; kepemilikan; hingga proyek bernilai miliaran rupiah untuk membangun aplikasi dan mendapatkan data di lembaga-lembaga pemerintah.

Pada pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Selasa 26 April 2016, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa informasi dan data yang akurat merupakan salah satu kunci dalam memenangkan kompetisi antarnegara. Dengan data yang akurat dan berkualitas, pemerintah dapat membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi di lapangan. Di saat yang sama Presiden juga menegaskan kepada seluruh kementerian untuk tidak lagi berorientasi pada proyek pencarian data.

Dalam tempo kurang lebih dua tahun terakhir, berdasarkan catatan yang kami buat, pemerintah mengeluarkan tiga regulasi yang diyakini akan mampu mengatasi persoalan data. Pertama adalah PP No. 17/2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran. Kedua adalah Perpres No. 95/2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dan terakhir yang cukup fenomenal dan mendasar adalah Perpres No. 39/2019 Tentang Satu Data Indonesia. Menurut Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho, kebijakan satu data menjadi kunci perbaikan program prioritas, seperti meningkatkan akurasi target penerima bantuan sosial.

Memang salah satu isu yang mendesak dan memerlukan data yang akurat dan terpadu adalah masalah kemiskinan. Isu kemiskinan tidak hanya terkait upaya memperoleh perkiraan tingkat kemiskinan berdasarkan ukuran garis kemiskinan, tetapi juga terkait data jumlah penduduk/rumah tangga dengan pemeringkatan kesejahteraan sebagai rujukan penetapan sasaran program.

Jika merunut bagaimana data kemiskinan dihasilkan di negara ini, maka dua upaya yang menghasilkan kelompok data makro dan kelompok data mikro di atas tidak lepas dari kritik dan masalah. Metodologi kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1998 sering mendapatkan kritik sebagai bias kepentingan politis atau tidak selalu mencerminkan realita kemiskinan/kesjahteraan sosial di daerah. Sementara data program penanganan fakir miskin di kementerian/lembaga lain masih belum terintegrasi. Dampaknya, data yang digunakan tidak komprehensif (memuat *exclusion error*) dan kurang akurat (memuat *inclusion error*).

Ditetapkannya UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan dasar hukum diselenggarakannya verifikasi dan validasi data BPS untuk rujukan penanggulangan kemiskinan sekurangnya dua kali dalam satu tahun. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus dikelola berbasis teknologi informasi sebagai data terpadu. Data terpadu itu secara prinsip dapat digunakan oleh kementerian/lembaga yang terkait dalam penanganan fakir miskin, serta dapat diakses pula oleh masyarakat. Strategi ini kemudian dipertajam melalui PP No. 63/2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah.

Hingga tahun 2015, hasil pendataan PSE05, PPLS 2008, dan PPLS 2011 telah digunakan untuk menyusun sasaran rumah tangga penerima program pengentasan kemiskinan mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Subsidi Masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), program pembagian beras untuk penduduk miskin (Raskin), Program Simpanan Keluarga Sejahtera 2015, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Penerima Bantuan

luran (PBI) Jaminan Kesehatan, dan sebagainya. Namun karena instrumen pendataan dan sistem informasi yang digunakan oleh kementerian/lembaga masih saling terpisah maka ketidaktepatan sasaran penerimaan bantuan sosial masih sering terjadi.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai tim *ad hoc* pada 2015 menyelenggarakan Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 (PBDT 2015). Beda dengan model pemutakhiran sebelumnya adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP). BDT juga digunakan untuk dasar pemeringkatan kesejahteraan yang dilakukan dengan metode statistik *Proxy-Means Testing* (PMT). Model PMT diklaim TNP2K dapat mewadahi keragaman karakteristik rumah tangga di setiap kabupaten/kota di Indonesia.

Pemerintah juga menyediakan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM). Melalui mekanisme ini, pemutakhiran data terpadu dapat lebih dinamis. Mulai tahun 2017, mekanisme pemutakhiran data terpadu dikuatkan oleh pemerintah dengan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation* (SIKS-NG) yang diselenggarakan melalui Kementerian Sosial RI. Sistem ini selain menghimpun Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM), juga sinkronisasi data penerima bantuan sosial/subsidi (seperti Rastra, BPNT, PKH, dan PBI), data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Integrasi data terpadu sesuai amanat undang-undang, diharapkan pemerintah akan semakin nyata terwujud.

### **Mencermati Model Satu Data untuk Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Gunungkidul**

Pada dua konteks itulah, yaitu satu data yang akurat terpadu serta data untuk rujukan sasaran program pengentasan kemiskinan, kita mendudukkan model yang dicapai Pemkab Gunungkidul. Melalui prinsip kedaulatan dan kepemilikan data tetap pada desa, sebagai perwujudan representasi warga yang paling kecil namun riil, integrasi data di Gunungkidul dilakukan dengan basis desa. Data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya, yang diberi nama lokal SIDA SAMEKTA, diintegrasikan ke Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB), yang memiliki nama lokal SIKAB GUMREGAH.

Berbekal konsep integrasi data yang kuat, mulai dari tujuan, langkah hingga tahapan, aplikasi SID Berdaya mampu dioptimalkan oleh Pemkab Gunungkidul sebagai alat olah data dan olah informasi (sebagai website desa). Prinsip dalam pengumpulan, integrasi, pengelolaan hingga pemanfaatan baik nonteknis maupun teknis aplikasi yang ada di tiga regulasi satu data yang dijelaskan di awal, relatif telah dipenuhi dalam siklus proses pembaruan data di Gunungkidul.

Akhir Semester I Tahun 2019, BDT 144 desa di seluruh Gunungkidul hasil pemutakhiran Semester II Tahun 2018 yang diolah dengan SID Berdaya dan SIKAB berhasil dikirimkan ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation* (SIKS-NG) Kementerian Sosial. Proses ini merupakan hasil seri koordinasi intensif antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatinkesos) Kementerian Sosial dalam membangun integrasi dan interoperabilitas BDT dari SID Berdaya ke SIKS-NG. Tujuan proses ini tidak hanya sekedar agar pemerintah desa tidak melakukan input data yang sama di beragam aplikasi, tetapi lebih jauh dari itu, yakni untuk memastikan ada satu data yang sama dalam tata kelola DT-PPFM di tingkat desa, kabupaten, hingga kementerian/lembaga. Diharapkan, data penerima sasaran program bantuan sosial di 144 desa di Kabupaten Gunungkidul, baik dengan sumber dana dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN, dapat secara sah diambil dari satu data yang sama yang bersumber dari desa.

Pada tingkat kabupaten, pemanfaatan BDT yang dimutakhirkan melalui SID Berdaya 144 desa dan diagregasikan ke SIKAB ini terhubung dengan sejumlah sistem informasi perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul, seperti e-Reses, e-Musren, e-Planning, dan e-Budgeting

(Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Datanya pun sudah mulai digunakan untuk perencanaan baik tingkat desa maupun kabupaten.

Uraian di atas dapat menggambarkan bagaimana upaya pemerintah untuk mengoptimalkan dua hal, yakni urusan satu data dan urusan penanganan fakir miskin. Beragam skema yang telah dijalankan secara nasional, ternyata hingga kini masih menyisakan sejumlah tantangan dan kendala. Tidak hanya soal akurasi dalam pendataan dan dalam penetapan sasaran program, tetapi aspek konteks juga muncul sebagai hal yang harus bisa dijawab. Masih menjadi pertanyaan besar, terutama bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dengan kewenangannya saat ini, kerja-kerja pemutakhiran data dan penargetan sasaran program yang diselenggarakan melalui kebijakan pusat itu sejatinya ditujukan untuk apa dan untuk siapa.

Pertanyaan tersebut akan selalu mengemuka sejauh masih terjadi ketidaksinkronan konsep, metodologi, dan instrumen pendataan dan penetapan sasaran program antar kementerian/lembaga/instansi. Model satu data untuk penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu upaya untuk membuktikan bahwa kebutuhan data oleh pusat dapat dipenuhi oleh daerah dan desa, tanpa harus mengabaikan/meninggalkan kedaulatan daerah dan desa atas data tersebut. Kabupaten Gunungkidul dapat membuktikan bahwa daerah dan desa tidak bisa hanya dijadikan sebagai objek pendataan dan/atau sebagai instansi yang dibebani tugas untuk mendata bagi pusat.

Model yang terjadi di Gunungkidul tersebut merupakan hasil dari proses yang panjang, dan akan terus dinamis namun dengan acuan prinsip yang sama dan pasti. Masalahnya adalah, model ini tidak serta merta menjadi solusi lantaran meski pihak sepakat bahwa tata kelola data terpadu itu penting, tetapi tidak semua paham bagaimana proses itu seharusnya dimulai dan dijalankan. Bahkan model ini berpotensi dianggap "sistem yang harus diganti dengan sistem satu data nasional" bila pemahaman akan satu data di level pusat masih seperti sekarang, yaitu parsial dan berorientasi ego sektoral dan bias kepentingan. Padahal baik Perpres SPBE maupun Satu Data membuka ruang luas terhadap model pengelolaan data oleh daerah selama masih sesuai prinsip teknis maupun nonteknis yang ditentukan.

Namun bahkan setelah tiga regulasi tentang integrasi data dan sistem tadi muncul, multitafsir masih terjadi dan yang menjadi korban lagi-lagi pemerintah dan warga di daerah maupun desa. Sebab, mengutip tulisan Dedi Haryadi Staf Ahli Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, ego sektoral dan *vested interest* itu masih kuat bercokol bahkan dalam satu direktorat di kementerian. Maka menjadi penting untuk terus berikhtiar mengharmoniskan dan mengintegrasikan pola pikir, visi dan kepentingan antarlembaga dan aktor.

## **B. Tujuan**

1. Memetakan bagaimana konsep integrasi data dari para kementerian/lembaga dan aktor terkait
2. Membahas bagaimana konsep Satu Data Indonesia dapat diimplementasikan untuk mendukung program penanganan fakir miskin, tanpa mengabaikan peran pemerintah daerah dan pemerintah desa
3. Menjawab bagaimana komitmen pemerintah pusat mengakomodir inisiatif pengelolaan data oleh daerah
4. Mengidentifikasi skema monitoring dan evaluasi prakarsa satu data yang ditawarkan para peserta untuk mengawal proses dan capaian penanganan fakir miskin terutama dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah

### C. Tempat dan Jadwal Kegiatan

Hari, tanggal : Selasa, 24 September 2019  
 Pukul : 08.00 – 13.30  
 Tempat : Ibis Jakarta Tamarin Hotel  
 Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 77 Jakarta Pusat

Waktu	Aktivitas	Narasumber / Moderator
07.30 – 08.00	<i>Kehadiran narasumber dan peserta</i>	Panitia
08.00 – 08.30	Pembukaan Sambutan Ketua Dewan Pembina CRI Perkenalan narasumber dan peserta FGD	MC / panitia  Moderator
08.30 – 08.45	<b>Presentasi 1</b> <u>Tema:</u> Strategi integrasi dan interoperabilitas data untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan dalam program penanganan fakir miskin  <u>Fokus:</u> - Transformasi digital pemerintah sebagai solusi permasalahan pengambilan keputusan dalam program penanganan fakir miskin - Arah pemanfaatan platform kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan Satu Data Indonesia untuk program penanganan fakir miskin	<u>Narasumber:</u> Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis Yanuar Nugroho
08.45 – 09.00	<b>Presentasi 2</b> <u>Tema:</u> Praktik baik satu data kemiskinan dari tingkat desa di Kabupaten Gunungkidul  <u>Fokus:</u> - Skema pemutakhiran data kemiskinan/kesejahteraan sosial secara terpadu dan partisipatif dari desa dan lintas-OPD dengan SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH sebagai bagian dari visi satu data di Kabupaten Gunungkidul - Praktik pemanfaatan satu data kemiskinan untuk perencanaan desa dan kabupaten -Tantangan	<u>Narasumber:</u> Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi
09.00 – 09.15	<b>Presentasi 3</b> <u>Tema:</u> Koordinasi pelaksanaan dan penyelesaian masalah satu data dalam program penanganan fakir miskin antar kementerian/lembaga dan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah/instansi daerah  <u>Fokus:</u> - Tahapan pembangunan satu data di level pusat dan daerah berikut target waktu; peran dan wewenang lembaga terkait di pusat dan daerah - Mekanisme kerja pengelolaan dan pemanfaatan data	<u>Narasumber:</u> Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS, Maliki

	penanganan fakir miskin antarkementerian/lembaga selama ini - Skema monitoring dan evaluasi data penanganan fakir miskin di tingkat pusat dan daerah	
09.15 – 09.30	<b>Presentasi 4</b> <u>Tema:</u> Model Data Kemiskinan yang Terpadu dalam konteks Satu Data Indonesia  <u>Fokus:</u> - Mekanisme pemutakhiran data terpadu penanganan fakir miskin - Rancangan skema integrasi dan interoperabilitas data terpadu penanganan fakir miskin dari pemerintah daerah - Metodologi satu data dalam penanganan fakir miskin	<u>Narasumber:</u> Kepala Pusdatinkesos Kementerian Sosial Republik Indonesia Said Mirza Pahlevi
09.30 – 09.45	<b>Presentasi 5</b> <u>Tema:</u> Strategi mencapai satu data kemiskinan dari desa  <u>Fokus:</u> - <i>Lesson learned</i> dari berbagai daerah terkait upaya mencapai satu data kemiskinan - <i>Lesson learned</i> Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya dan Sistem Informasi Kabupaten di beberapa daerah	<u>Narasumber:</u> Direktur Combine Resource Institution (CRI) Imung Yuniardi
09.45 – 10.00	<i>Coffee break</i>	MC / Panitia
10.00 – 12.00	<b>Diskusi</b>	Moderator
12.00 – 12.15	Penutup	MC / Panitia
12.15 – 13.30	<i>Makan siang</i>	Panitia

#### E. Peserta dan Narasumber/Pemantik Diskusi

Peserta utama FGD ini adalah jajaran Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi terkait prakarsa Satu Data Indonesia, serta Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pada urusan penanganan/penanggulangan kemiskinan. Perwakilan BAPPENAS, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Sosial sekaligus bertindak sebagai narasumber/pemantik diskusi. Kelompok peserta lain adalah dari perwakilan lembaga donor di Indonesia, serta media. Perwakilan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hadir sebagai narasumber, sekaligus peserta. CRI sebagai penyelenggara diskusi juga akan bertindak sebagai narasumber, sekaligus peserta. Dengan demikian, hasil (*output*) dari pembahasan isu dalam FGD ini dapat langsung dipastikan terhubung dengan kewenangan dan kebijakan dari masing-masing instansi yang terlibat.

No.	Kementerian / Lembaga / Instansi	
1	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Wakil Bupati ( <b><i>narasumber</i></b> )
2		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
4		Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan

		Kesejahteraan Sosial, Kedepujian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan ( <b><i>narasumber</i></b> )
5	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
7	Kementerian Dalam Negeri RI	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
8		Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Kementerian Keuangan RI	Direktur Jenderal Anggaran
10	Badan Pusat Statistik	Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik
11	Kementerian Sosial RI	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial ( <b><i>narasumber</i></b> )
12	Kementerian Kesehatan RI	Kepala Pusat Data dan Informasi
13	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
14	Kantor Staf Presiden	Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis ( <b><i>narasumber</i></b> )
15	Badan Pemeriksa Keuangan RI	Auditorat Keuangan Negara IIIB
16	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Sekretaris Eksekutif
17	BAPPEDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kepala BAPPEDA
18	Ford Foundation	Country Director, Kantor Jakarta
19	HIVOS	Perwakilan lembaga
20	USAID	Perwakilan lembaga
21	KOMPAK	Senior Advisor - Program kemitraan pemerintah Australia - Indonesia
22	Media	